



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAMBANG SUTARMANTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 411538

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.319.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/292 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 730.000.000
2. Tanah Seluas 921 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 645.000.000
3. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 104.250.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 390.000.000
5. Bangunan Seluas 128 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.300.000**

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
4. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA2.0 V A/T Tahun 2017, WARISAN Rp. 195.000.000



6. MOTOR, HONDA D10B02N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.205.882

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.023.905.882

III. HUTANG Rp. 132.279.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.891.626.382

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.